



PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP  
NOMOR 20 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN CILACAP  
TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2014, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berkenaan, maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 13 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2004 Nomor 13, Seri C Nomor 7) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 13 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 14);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah di Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2010 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah di Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2012 Nomor 18);

## Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CILACAP  
dan  
BUPATI CILACAP

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN ANGGARAN 2014.

## Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 sebagai berikut :

1. Pendapatan	:		
a. Semula		Rp. 2.057.405.849.250,-	
b. Bertambah		<u>Rp. 195.563.860.350,-</u>	
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan			Rp. 2.252.969.709.600,-
2. Belanja	:		
a. Semula		Rp. 2.148.333.134.800,-	
b. Bertambah		<u>Rp. 388.166.295.800,-</u>	
Jumlah Belanja setelah Perubahan			Rp. 2.536.499.430.600,-
3. Pembiayaan	:		
a. Penerimaan			
1) Semula		Rp. 96.813.929.550,-	
2) Bertambah		<u>Rp. 245.602.435.450,-</u>	
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan			Rp. 342.416.365.000,-
b. Pengeluaran			
1) Semula		Rp. 5.886.644.000,-	
2) Bertambah		<u>Rp. 53.000.000.000,-</u>	
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan			Rp. 58.886.644.000,-
Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan			<u>Rp. 283.529.721.000,-</u>
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Setelah Perubahan			Rp 0,-

## Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a terdiri dari:

## a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula	Rp. 230.155.062.000,-
2) Bertambah	<u>Rp. 77.189.405.000,-</u>

Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan Rp. 307.344.467.000,-

## b. Dana Perimbangan

1) Semula	Rp. 1.474.669.353.750,-
2) Berkurang	<u>(Rp. 6.867.377.300,-)</u>

Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan Rp 1.467.801.976.450,-

## c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

1) Semula	Rp.	352.581.433.500,-
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>125.241.832.650,-</u>

Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah perubahan Rp. 477.823.266.150,-

## (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari

## a. Pajak Daerah

1) Semula	Rp.	88.280.500.000,-
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>12.747.500.000,-</u>

Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan Rp. 101.028.000.000,-

## b. Retribusi Daerah

1) Semula	Rp.	21.440.905.800,-
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>8.972.995.200,-</u>

Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan Rp. 30.413.901.000,-

## c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

1) Semula	Rp.	9.928.444.000,-
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>930.305.000,-</u>

Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah perubahan Rp. 10.858.749.000,-

## d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

1) Semula	Rp.	110.505.212.200,-
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>54.538.604.800,-</u>

Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah setelah perubahan Rp. 165.043.817.000,-

## (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

## a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

1) Semula	Rp.	73.343.689.750,-
2) Berkurang	<u>(Rp.)</u>	<u>6.867.377.300,-</u>

Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak setelah perubahan Rp. 66.476.312.450,-

## b. Dana Alokasi Umum

1) Semula	Rp.	1.291.121.704.000,-
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,-</u>

Jumlah Dana Alokasi Umum setelah perubahan Rp. 1.291.121.704.000,-

## c. Dana Alokasi Khusus

1) Semula	Rp.	110.203.960.000,-
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,-</u>

Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan Rp. 110.203.960.000,-

- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
- |   |            |                         |
|---|------------|-------------------------|
| 1) Semula                                 | Rp.        | 65.006.550.000,-        |
| 2) Bertambah                              | <u>Rp.</u> | <u>51.904.081.150,-</u> |
| Jumlah Bagi Hasil Pajak setelah perubahan |            | Rp. 116.910.631.150,-   |
- b. Dana Penyesuaian Otonomi Khusus
- |  |            |                         |
|--|------------|-------------------------|
| 1) Semula  | Rp.        | 287.574.883.500,-       |
| 2) Bertambah   | <u>Rp.</u> | <u>27.757.683.500,-</u> |
| Jumlah Dana Penyesuaian Otonomi Khusus setelah perubahan |            | Rp. 315.332.567.000,-   |
- c. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
- |  |            |                         |
|--|------------|-------------------------|
| 1) Semula  | Rp.        | 0,-                     |
| 2) Berkurang   | <u>Rp.</u> | <u>45.580.068.000,-</u> |
| Jumlah Bantuan keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya setelah perubahan |            | Rp. 45.580.068.000,-    |

### Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b terdiri dari:
- a. Belanja Tidak Langsung
- |   |            |                          |
|---|------------|--------------------------|
| 1) Semula                                       | Rp.        | 1.390.079.369.800,-      |
| 2) Bertambah                                    | <u>Rp.</u> | <u>118.998.598.000,-</u> |
| Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan |            | Rp. 1.509.077.967.800,-  |
- b. Belanja Langsung
- |   |            |                          |
|---|------------|--------------------------|
| 1) Semula                                 | Rp.        | 758.253.765.000,-        |
| 2) Bertambah                              | <u>Rp.</u> | <u>269.167.697.800,-</u> |
| Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan |            | Rp. 1.027.421.462.800,-  |
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja Pegawai
- |  |            |                         |
|--|------------|-------------------------|
| (1) Semula                               | Rp.        | 1.214.780.012.800,-     |
| (2) Bertambah                            | <u>Rp.</u> | <u>80.140.882.000,-</u> |
| Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan |            | Rp. 1.294.920.894.800,- |
- b. Belanja Bunga sejumlah
- |  |            |                  |
|--|------------|------------------|
| (1) Semula                             | Rp.        | 53.000.000,-     |
| (2) Bertambah                          | <u>Rp.</u> | <u>0,-</u>       |
| Jumlah Belanja Bunga setelah perubahan |            | Rp. 53.000.000,- |
- c. Belanja Hibah
- |  |            |                         |
|--|------------|-------------------------|
| (1) Semula                             | Rp.        | 49.447.595.000,-        |
| (2) Bertambah                          | <u>Rp.</u> | <u>39.990.291.000,-</u> |
| Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan |            | Rp. 89.437.886.000,-    |

- d. Belanja Bantuan Sosial
- |   |            |                     |
|---|------------|---------------------|
| (1) Semula                                      | Rp.        | 2.635.250.000,-     |
| (2) Bertambah                                   | <u>Rp.</u> | <u>78.500.000,-</u> |
| Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan |            | Rp. 2.713.750.000,- |
- e. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, dan Partai Politik
- |   |            |                   |
|---|------------|-------------------|
| (1) Semula                                  | Rp.        | 434.613.000,-     |
| (2) Bertambah                               | <u>Rp.</u> | <u>0,-</u>        |
| Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah perubahan |            | Rp. 434.613.000,- |
- f. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, dan Partai Politik
- |   |            |                       |
|---|------------|-----------------------|
| (1) Semula                                  | Rp.        | 114.228.899.000,-     |
| (2) Bertambah                               | <u>Rp.</u> | <u>640.600.000,-</u>  |
| Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah perubahan |            | Rp. 114.869.499.000,- |
- g. Belanja Tidak Terduga sejumlah
- |  |              |                        |
|--|--------------|------------------------|
| (1) Semula                                     | Rp.          | 8.500.000.000,-        |
| (2) Berkurang                                  | <u>(Rp.)</u> | <u>1.851.675.000,-</u> |
| Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan |              | Rp. 6.648.325.000,-    |
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:
- a. Belanja Pegawai
- |  |            |                        |
|--|------------|------------------------|
| (1) Semula                               | Rp.        | 82.057.147.500,-       |
| (2) Bertambah                            | <u>Rp.</u> | <u>6.980.012.500,-</u> |
| Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan |            | Rp. 89.037.160.000,-   |
- b. Belanja Barang dan Jasa
- |  |            |                          |
|--|------------|--------------------------|
| (1) Semula                                       | Rp.        | 302.294.083.500,-        |
| (2) Bertambah                                    | <u>Rp.</u> | <u>107.286.643.400,-</u> |
| Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan |            | Rp. 409.580.726.900,-    |
- c. Belanja Modal
- |  |            |                          |
|--|------------|--------------------------|
| (1) Semula                             | Rp.        | 373.902.534.000,-        |
| (2) Bertambah                          | <u>Rp.</u> | <u>154.901.041.900,-</u> |
| Jumlah Belanja Modal setelah perubahan |            | Rp. 528.803.575.900,-    |

#### Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c terdiri dari :
- a. Penerimaan
- |                                     |            |                          |
|-------------------------------------|------------|--------------------------|
| (1) Semula                          | Rp.        | 96.813.929.550,-         |
| (2) Bertambah                       | <u>Rp.</u> | <u>245.602.435.450,-</u> |
| Jumlah Penerimaan setelah perubahan |            | Rp. 342.416.365.000,-    |

b. Pengeluaran	
(1) Semula	Rp. 5.886.644.000,-
(2) Bertambah	<u>Rp. 53.000.000.000,-</u>
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp. 58.886.644.000,-
(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :	
SILPA Tahun Sebelumnya	
(1) Semula	Rp. 96.813.929.550,-
(2) Bertambah	<u>Rp. 245.602.435.450,-</u>
Jumlah SILPA Tahun Sebelumnya setelah perubahan	Rp. 342.416.365.000,-
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:	
a. Penyertaan Modal	
(1) Semula	Rp. 5.800.000.000,-
(2) Bertambah	<u>Rp. 53.000.000.000,-</u>
Jumlah Penyertaan Modal setelah perubahan	Rp. 58.800.000.000,-
b. Pembayaran Pokok Utang	
(1) Semula	Rp. 86.644.000,-
(2) Bertambah	<u>Rp. 0,-</u>
Jumlah Pembayaran Pokok Utang setelah perubahan	Rp. 86.644.000,-
c. Pembayaran Hutang Daerah	
(3) Semula	Rp. 0,-
(4) Bertambah	<u>Rp. 0,-</u>
Jumlah Pembayaran Pokok Utang setelah perubahan	Rp. 0,-

#### Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2014 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III : Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan;



5. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII : Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
8. Lampiran VIII : Daftar Pinjaman Daerah.

#### Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2014 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

#### Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap  
pada tanggal 11 Agustus 2014

BUPATI CILACAP,

cap & ttd.

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap  
pada tanggal 11 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN CILACAP,

cap & ttd.

SUTARJO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2014 NOMOR 20

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP, PROVINSI JAWA TENGAH :  
(113/TAHUN 2014).